

PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DESA SUNGAI RAYA DALAM PADA PEMILIHAN BUPATI KUBU RAYA TAHUN 2013

Oleh:

**MARTINUS MANALU
NIM. E02109036**

Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Tanjungpura Pontianak. Martinus_manalu@yahoo.com

Abstrak

Penulisan Skripsi ini berawal dari tingkat partisipasi politik masyarakat desa Sungai Raya Dalam yang rendah pada saat pemilihan Bupati Kubu Raya tahun 2013 dan Skripsi ini dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat desa Sungai Raya Dalam tersebut. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat Desa Sungai Raya Dalam pada saat pemilihan Bupati tahun 2013 disebabkan beberapa faktor diantaranya yaitu pertama kurangnya kesadaran politik masyarakat. Kedua, faktor kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dimana kedua faktor ini sama-sama menimbulkan sikap apatis namun dalam konteks yang berbeda. Ketiga, faktor ekonomi, faktor ekonomi sangat erat kaitannya dengan pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, selain itu faktor ekonomi juga berpengaruh terhadap faktor untung rugi yang dirasakan masyarakat jika mereka ikut berpartisipasi. Keempat, faktor sosialisasi dimana kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh para calon Bupati dan partai politik pengusung. Yang kelima yaitu faktor administrasi dimana masyarakat tidak mendapatkan kartu undangan pada saat pemilihan Bupati. Sedangkan faktor dominan yang mempengaruhi rendahnya tingkat partisipasi masyarakat adalah sikap apatis.

Kata-kata kunci: Pemilihan Bupati, rendahnya partisipasi, faktor-faktor rendahnya partisipasi.

Abstract

Thesis writing is started from the level of political participation of villagers Sungai Raya Dalam low at the time of Kubu Raya regency elections in 2013 and this thesis is intended to determine what factors are causing the low level of political participation of villagers Sungai Raya Dalam. Based on the survey results revealed that the low level of political participation of the villagers Sungai Raya Dalam at the election of Regent in 2013 due to several factors, including: firstly the lack of political awareness of society. Second, the factor of public trust in government in which both these factors together lead to apathy, but in a different context. Third, economic factors, economic factors are closely related to the work that can not be abandoned, in addition to economic factors also affect the profit and loss factor of the public felt if they participate. Fourth, lack of socialization factors which are performed by the candidates and political parties bearers Regents. The fifth is the administrative factors that people do not get an invitation card at the election of Regent. While the dominant factor affecting the low level of public participation is apathy.

Keywords: Selection of Regents, the low participation, factors lace participation.

A. PENDAHULUAN

Pelaksanaan pilkada langsung lahir merupakan koreksi terhadap pelaksanaan Pilkada melalui perwakilan (oleh DPRD) sebagaimana pernah diamanatkan Undang-Undang NO. 22 Tahun 1999. Koreksi ini semakin nyata dengan diimplementasikannya payung hukum pelaksanaan Pilkada Langsung, yakni Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Pilkada langsung telah membawa angin segar bagi tumbuhnya demokrasi di tingkat lokal. Dengan Pilkada langsung, masyarakat di daerah memiliki haknya yang paling benar dalam demokrasi yaitu memilih sendiri pemimpinnya. Pemilihan langsung juga memberikan peran yang sangat besar bagi masyarakat dalam menentukan masa depan daerahnya. Di samping itu, pemilihan langsung diakui akan dapat menaikkan derajat legitimasi kepala daerah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kualitas demokrasi yang berkembang di daerah menjadi lebih baik bila dilihat dari segi peran masyarakat.

Salah satu tolak ukur untuk melihat kesuksesan pelaksanaan Pilkada di suatu daerah dapat dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat itu sendiri karena partisipasi dapat diartikan sebagai bentuk keikutsertaan seseorang dalam menentukan pemimpin dan masa depan suatu daerah maupun Negara. Oleh sebab itu partisipasi setiap warga negara diperhatikan oleh negara melalui aktivitas pemerintahannya. Hal ini senada dengan apa yang menjadi dasar pemikiran dari dibuatnya kebijakan

UU kewarganegaraan RI Nomor: 12 tahun 2006, dimana dinyatakan bahwa pemerintah RI menjamin potensi, harkat, dan martabat setiap orang sesuai dengan hak asasi manusia.

Partisipasi politik juga tidak hanya sekedar dari hak aktif setiap warga negara dalam pemilihan langsung kepala daerah namun lebih merupakan salah satu amanat dari beberapa sisi penting amanat reformasi di bidang politik di Indonesia yaitu dengan adanya otonomi daerah, dimana daerah bisa mengurus dirinya sendiri. Tentu otonomi daerah tidak akan berjalan dengan baik jika masyarakatnya tidak turut ambil bagian dalam mengurus daerahnya. salah satu bagian dasar bagi masyarakat untuk ikut serta mengurus daerahnya yaitu dengan menggunakan hak suara yang telah diberikan dalam pemilihan kepala daerah. Meskipun demikian masih banyak masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya karena alasan-alasan tertentu.

Pada tahun 2013 yang lalu masyarakat Kabupaten Kubu Raya telah melakukan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati untuk yang kedua kalinya setelah tahun 2008. Masyarakat Kubu Raya diberi kebebasan untuk memilih salah satu dari pasangan calon kandidat, namun tingkat partisipasi masyarakat masih rendah yang ditunjukan oleh banyaknya masyarakat yang tidak menggunakan hak pilih yang mereka dimiliki, seperti di Desa Sungai Raya Dalam Kecamatan Sungai Raya.

Berdasarkan data yang diperoleh dari kantor KPU Kabupaten Kubu Raya yang menunjukkan jumlah penggunaan

hak pilih masyarakat di Kecamatan Sungai Raya pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya tahun 2013 berdasarkan tiap-tiap desa. Dari 20 desa yang ada di Kecamatan Sungai Raya. Desa Sungai Raya Dalam merupakan desa dengan presentase jumlah memilih yang paling rendah bila dibandingkan 19 desa lainnya, di mana dari 14.423 pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) hanya 7000 (48.53 %) yang menggunakan hak suaranya.

Berdasarkan pada fenomena yang telah diuraikan, yaitu terkait dengan rendahnya penggunaan hak pilih masyarakat di Desa Sungai Raya Dalam jika dibandingkan dengan desa lainnya di Kecamatan Sungai Raya, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang partisipasi politik masyarakat di Desa Sungai Raya Dalam pada pemilihan Bupati Kubu Raya tahun 2013.

B. METODE

Berhubungan jenis penelitian menggunakan metode deskriptif berarti pendekatan dalam penelitian ini mengarah pada pendekatan penelitian kualitatif, karena masalah yang diteliti merupakan gejala sosial yang terdapat pada partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat pada saat pemilihan Bupati Tahun 2013.

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah Ketua KPU Kabupaten Kubu Raya, Ketua PPS (Panitia Pemungutan Suara), Kepala Desa Sungai Raya Dalam, Ketua RT, Tokoh Agama, Tokoh Politik, dan masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya pada saat pemilihan Bupati Kabupaten Kubu Raya tahun 2013,

sebanyak 13 orang. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu: wawancara dan studi kepustakaan/dokumentasi. Adapun Teknik Analisis data yang digunakan yaitu: (1) reduksi data; (2) penyajian data; (3) penarikan kesimpulan atau verifikasi.

C. Tinjauan Pustaka

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik

Menurut Surbakti (1992:144), faktor-faktor yang diperkirakan mempengaruhi tinggi-rendahnya partisipasi seseorang ialah kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah (sistem politik). Yang dimaksud dengan kesadaran politik ialah kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Kesadaran ini mencakup pengetahuan, minat dan perhatian seseorang terhadap masyarakat dan politik tempat ia hidup. Sedangkan yang dimaksud dengan sikap dan kepercayaan kepada pemerintah ialah penilaian seseorang terhadap pemerintah: apakah ia menilai pemerintah dapat dipercaya dan dapat dipengaruhi atau tidak?

Berdasarkan tinggi-rendahnya kedua faktor tersebut menurut Paige (dalam Surbakti, 1992: 144), mengatakan bahwa apabila seseorang memiliki kesadaran politik dan tingkat kepercayaan kepada pemerintah tinggi maka partisipasi politik cenderung aktif. Sebaliknya apabila kesadaran politik dan tingkat kepercayaan kepada pemerintah rendah maka partisipasi politik masyarakat cenderung pasif-tertekan (Aptis).

Sedangkan ada atau tidaknya partisipasi politik masyarakat menurut Jalbi (dalam Ruslan, 2000:105) dapat diklasifikasikan ke dalam dua golongan yakni

1. Partisipan, atau orang-orang yang aktif berpolitik. Inilah bentuk konkret partisipasi aktif.
2. Non Partisipan politik. Inilah bentuk konkret yang tidak berpartisipasi. Mereka tidak berada pada satu tingkat, akan tetapi dapat dibedakan menjadi dua kelompok. Kelompok pertama, orang-orang yang memang tidak berusaha untuk berpartisipasi, seperti orang-orang yang sudah terbiasa tidak menggunakan hak suara mereka. Misalnya, ketidakpedulian pada sebagian tokoh agama yang memiliki pemahaman sempit akan agamanya, dan sebagian mereka beranggapan bahwa ketidakpedulian politik merupakan nilai, hal tersebut juga terjadi pada kaum perempuan di sebagian masyarakat. Kelompok kedua, orang-orang yang meremehkan urusan politik. Bentuk konkret sikap ini dapat di lihat pada tiga fenomena yaitu 1). Ketidakpedulian politik. Yaitu tidak memberikan perhatian terhadap segala yang terjadi di dalam masyarakat pada umumnya, atau pada sebagiannya. Dampaknya, yang ada hanya kepatuhan kepada segala yang datang dari penguasa.

Ini terjadi mungkin akibat ketidakmampuan individu untuk memikul tanggung jawab, atau akibat rasa takut dan tidak aman. 2). Keraguan politik.

Yaitu ketidakpercayaan seseorang terhadap sikap dan perkataan para politikus, serta perasaan bahwa aktivitas polituik adalah pekerjaan buruk. 3). Keterasingan politik. Yaitu perasaan asing yang dirasakan oleh individu terhadap pemerintah dan sistem politik masyarakatnya, dan keyakinan bahwa pemerintah dan garis politiknya dijalankan oleh orang lain untuk kepentingannya sendiri dengan kaidah-kaidah yang tidak adil, serta munculnya perasaan bahwa kekuasaan bukanlah urusannya. Ia bukanlah apa-apa. Karena itu, lenyaplah semangat dan motivasinya untuk berpartisipasi.

Morris Rosenberg (dalam Maran, 2007:156), mengemukakan tiga alasan, mengapa orang tidak mau berpartisipasi dalam kehidupan politik.

1. Karena ketakutan akan konsekuensi negatif dari aktivitas politik. Disini orang beranggapan bahwa aktivitas politik merupakan ancaman terhadap kehidupannya.
2. Karena orang beranggapan bahwa berpartisipasi dalam kehidupan politik merupakan kesia-siaan. Dia merasa sia-sia, karena partisipasi

- politiknya tidak akan mempengaruhi proses politik.
3. Karena tidak adanya perangsang untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik. Di sini orang, misalnya, tidak menghargai gagasan-gagasan politik. Tak ada hasil yang bisa dipetik dari partisipasi tersebut. Maka orang pun enggan atau tidak mau berpartisipasi dalam aktivitas politik.

Begitu juga halnya dengan Novel Ali (1999:22), yang membagi kelompok masyarakat yang tidak menggunakan hak pilih pada pemilu di Indonesia dalam dua kelompok.

Pertama, adalah Kelompok awam. Yaitu mereka yang tidak mempergunakan hak pilihnya bukan karena alasan politik, tetapi karena alasan ekonomi, kesibukan dan sebagainya. Kemampuan politik kelompok ini tidak sampai ke tingkat analisis, melainkan hanya sampai tingkat deskriptif saja. *Kedua*, adalah Kelompok pilihan. Yaitu mereka yang tidak bersedia menggunakan hak pilihnya dalam pemilu benar-benar karena alasan politik. Misalnya tidak puas dengan kualitas partai politik yang ada. Atau karena mereka menginginkan adanya satu organisasi politik lain yang sekarang belum ada. Maupun karena mereka mengkehendaki pemilu atas dasar sistem distrik, dan berbagai alasan lainnya. Kemampuan analisis politik

mereka jauh lebih tinggi dibandingkan kelompok awam. kelompok pilihan ini memiliki kemampuan analisis politik yang tidak Cuma berada pada tingkat deskripsi saja, tapi juga pada tingkat evaluasi.

Sedangkan menurut Eep Saefulloh Fatah, (diambil dari <https://lampungpolitika.wordpress.com/2008/08/04/golput-dan-krisis-kepercayaan/>, Tanggal 15 Januari 2015) mengklasifikasikan orang tidak memilih (Golput) pada saat pemilu maupun memilikadikarenaka 4 (empat) faktor yaitu:

1. Faktor teknis, yakni mereka yang karena sebab-sebab teknis tertentu (keluarga meninggal, ketiduran, dan lain-lain) berhalangan hadir ke tempat pemungutan suara, atau mereka yang keliru mencoblos sehingga suaranya dinyatakan tak sah.
2. Faktor teknis-politis, seperti mereka yang tidak terdaftar sebagai pemilih karena kesalahan dirinya atau pihak lain (lembaga statistik, penyelenggara pemilu).
3. Faktor politis, yakni mereka yang merasa tak punya pilihan dari kandidat yang tersedia atau tak percaya bahwa pilkada akan membawa perubahan dan perbaikan.
4. Faktor ideologis, yakni mereka yang tak percaya pada mekanisme demokrasi (liberal) dan tak mau terlibat di dalamnya entah karena alasan fundamentalisme

agama atau alasan politik-ideologi lain.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Rendahnya Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Desa Sungai Raya Dalam, Pada Saat Pemilihan Bupati Kubu Raya Tahun 2013.

D.1. Faktor Kesadaran Politik Masyarakat

Kesadaran politik adalah sebuah kesadaran yang harus dimiliki oleh setiap masyarakat tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, agar dapat mensikapi masalah politik yang ada di lingkup kebijakan Pemerintah. Dalam kaitannya rakyat merupakan sumber kekuasaan negara, rakyat pula yang secara langsung ataupun tidak langsung menjadi pengurus atau penyelenggara negara, dan pada akhirnya untuk kepentingan seluruh rakyat pulalah penyelenggara negara itu sesungguhnya dimaksudkan. Inilah yang tercermin dalam semboyan “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”. Maka dari pada itu masyarakat dituntut untuk ikut serta dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh negara salah satunya ikut serta berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah, mengingat kompleks dan beratnya beban yang harus dipikul para penyelenggara negara salah satu contoh yaitu besarnya anggaran yang harus dikeluarkan oleh pemerintah, serta penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang memakan waktu cukup lama dan banyak mengalami masalah, seperti keakuratan data.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua KPUD Kubu Raya IM, saat ditanyakan mengenai pengaruh kesadaran politik masyarakat terhadap rendahnya tingkat partisipasi politik pada saat Pilkada pada tahun 2013 yang lalu, beliau menjawab:

Kalau saya lihat, pengaruh kesadaran politik terhadap rendahnya tingkat partisipasi memang ada, namun tidak begitu besar. Faktor kesadaran politik lebih disebabkan oleh Kesadaran masyarakat yang belum mendalam mengenai hakikat politik itu sendiri, sehingga pelaksanaan pemilihan kepala daerah dianggap lebih pada sebuah acara ramai-ramai belaka. Belum sampai pada kesadaran bahwa pemilihan kepala daerah adalah kesempatan di mana mereka sama-sama menentukan arah kebijakan untuk kedepannya.

Pendapat tersebut juga sesuai dengan yang disampaikan oleh salah satu Kepala Dusun yaitu bapak PN, saat ditanya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat di Desa Sungai Raya Dalam pada saat pelaksanaan Pilkada tahun 2013. Beliau mengatakan bahwa: “salah satu faktor rendahnya partisipasi politik masyarakat di Desa Sungai Raya Dalam kalau menurut saya mungkin lebih karena kesadaran politik masyarakat yang kurang, dimana mereka beranggapan, ah dari pada saya repot-repot memilih lebih baik saya pergi mancing jak lah”.

Sedangkan menurut ketua PPS yaitu bapak SH saat ditanya

mengenai permasalahan yang sama bapak SH mengatakan bahwa:

Faktor yang mengakibatkan rendahnya tingkat partisipasi politik sebenarnya ada banyak, pertama kalau saya lihat lebih kepada kurangnya kepedulian masyarakat tentang hak politik yang dimiliki, mereka beranggapan tidak ada manfaat menggunakan hak politik tersebut. Kadang-kadang juga, masyarakat itu beranggapan suara saya cuma satu dan itu tidak akan berpengaruh jadi lebih baik saya golput jak lah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa masyarakat desa Sungai Raya Dalam seperti, WD saat ditanya mengapa dia tidak memilih pada saat pemilihan bupati pada tahun 2013, dia mengatakan bahwa “pada saat pemilihan bupati saya lebih memilih untuk beristirahat di rumah soalnya saya malas mau datang ke TPS”, hal serupa juga disampaikan oleh ED dimana saat ditanya mengenai permasalahan yang sama ia mengatakan bahwa “saya memilih atau tidak sama saja toh saya juga begini-begini aja”.

Berdasarkan pendapat dari beberapa informan diatas tampak jelas bahwa informan tidak berminat terhadap kegiatan politik yang sedang berlangsung dan adanya sikap masa bodoh (apatis) dari informan. Tentu sikap masyarakat ini tidak bisa disalahkan dimata hukum mengingat tidak ada dalam undang-undang Republik Indonesia yang melarang seseorang yang tidak ikut serta dalam setiap kegiatan yang dilakukan

oleh negara khususnya kegiatan pilkada, bahkan negara Indonesia menjamin Hak Asasi dari setiap warganya termaksud Hak untuk tidak memilih pada saat Pilkada. Namun, paling tidak kesadaran politik masyarakat dapat ditingkatkan jika semua pihak khususnya pemerintah dan partai politik mau turut ambil bagian dalam menciptakan sistem demokrasi yang bersih.

D.2. Faktor Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pemerintah

Kepercayaan masyarakat pada pemerintah ialah penilaian seseorang terhadap kinerja pemerintah apakah ia menilai pemerintah dapat dipercaya dan dapat dipengaruhi atau tidak. Selain itu kepercayaan kepada pemerintah juga merupakan suatu bentuk penghargaan kepada orang yang memerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dapat dilakukan dengan tindakan atau pun hanya dengan dukungan kepada pemerintah, bentuk penghargaan berupa tindakan yaitu dapat ditunjukan dengan cara ikut serta melibatkan diri dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk membangun daerah atau negara itu sendiri, sedangkan bentuk kepercayaan berupa dukungan yaitu dapat dilakukan dengan cara memberikan dukungan secara sosial atau dukungan secara moral terhadap pemerintah sehingga dengan sendirinya kita akan memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada pemerintah.

Berdasarkan pengertian diatas bentuk dukungan dan tindakan atas

dasar kepercayaan pada pemerintah dari bidang politik dapat berupa ikut serta dalam menggunakan hak suara yang dimiliki pada saat pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Namun jika masyarakat sudah tidak percaya pada pemerintah maka yang terjadi tentu kurangnya dukungan dari sebagian masyarakat dalam urusan-urusan negara, salah satu contoh yaitu dimana masyarakat tidak mau terlibat dalam urusan politik seperti tidak menggunakan hak suara yang dimiliki pada saat pemilihan kepala daerah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua KPU Kabupaten Kubu Raya IM saat ditanya mengenai bagaimana pengaruh kepercayaan masyarakat pada pemerintah terhadap rendahnya tingkat partisipasi politik pada saat pilkada tahun 2013 yang lalu, beliau mengatakan bahwa

Arti dari pemerintah disini tentu sangat luas, kami (KPU) juga adalah bagian dari pemerintah. Pemerintah disini mungkin lebih kepada pemimpin sebelumnya dan calon-calon yang akan memerintah nanti. Kalau untuk pemimpin yang sebelumnya, menurut saya mungkin masyarakat tidak melihat perubahan yang nyata selama lima tahun pemerintahannya. Sedangkan untuk calon-calon yang baru kelihatannya sebagian masyarakat bersifat pesimis, dalam arti masyarakat sudah tidak percaya lagi dengan siapapun yang akan memimpin nantinya atau dengan kata lain timbulnya

kecurigaan dalam diri masyarakat. Faktor ini memang menurut saya merupakan faktor yang sangat besar pengaruhnya terhadap rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat pada pilkada tahun lalu.

Hal yang tidak jauh berbeda juga di sampaikan oleh salah satu ketua RT di Desa Sungai Raya Dalam yaitu bapak SSD saat ditanya mengenai faktor penyebab banyaknya masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya pada pemilihan bupati tahun 2013 di Desa Sungai Raya Dalam. Beliau menjawab bahwa:

Faktor yang mengakibatkan masyarakat di Desa Sungai Raya Dalam banyak yang tidak menggunakan hak pilihnya kalau menurut saya lebih dikarenakan oleh sikap malas dari masyarakat terhadap sistem pemilu yang kelihatan hanya sebagai rutinitas lima tahun sekali tidak ada perubahan yang berarti setelah pemilu selesai dilaksanakan. Ini terjadi karena para pemimpin yang pernah duduk dipemerintahan tidak memberikan perubahan yang nyata di mata masyarakat. Sehingga siapapun yang akan tampil sebagai calon pasti timbul sikap keraguan di dalam diri mereka (masyarakat)".

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua KPUD dan salah satu ketua RT diatas dimana para informan merasa bahwa adanya krisis kepemimpinan yang dirasakan

oleh masyarakat di desa Sungai Raya. Dalam sehingga menurut informan, masyarakat meragukan kredibilitas yang dimiliki oleh para calon yang tampil apakah nantinya calon yang ada ini bisa mewakili aspirasi mereka untuk kedepannya atau tidak. Timbulnya rasa curiga terhadap para calon yang tampil menurut informan juga tidak bisa dilepaskan dari kinerja pemerintahan selama ini yang sudah terlalu sering mengabaikan aspirasi yang berkembang di masyarakat khususnya masyarakat bawah sehingga timbul rasa jenuh terhadap proses pilkada yang tidak memberikan perubahan nyata bagi masyarakat itu sendiri. Timbulnya rasa jenuh masyarakat terhadap proses pilkada menunjukkan bahwa ada yang salah dari kehidupan politik yang berjalan sekarang ini, politik berjalan dan berkembang seperti hanya berkaitan dengan apa yang diinginkan dan didambakan para elit politik tidak sampai pada apa yang diinginkan oleh masyarakat itu sendiri.

Seperti penjelasan mengenai kesadaran politik pada pembahasan sebelumnya yang diakibatkan oleh sikap apatis masyarakat terhadap setiap kegiatan politik karena pengetahuan masyarakat yang kurang mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia, sehingga masa bodoh dengan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan pemerintah. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah juga menimbulkan sikap apatis, namun dalam konteks yang berbeda, dimana masyarakat ingin menggunakan hak pilih yang mereka miliki, namun karena alasan ketidakpercayaan

sehingga menimbulkan sikap masa bodoh dari masyarakat terhadap hak suara yang dimiliki.

Pernyataan di atas sesuai dengan pendapat BM salah satu tokoh politik dari PDIP, saat ditanya mengenai faktor apa yang menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat pada pemilihan Bupati tahun 2013 yang lalu, menurutnya “.....masyarakat sudah tidak termotivasi lagi untuk ikut terlibat dalam pelaksanaan pilkada karena masyarakat sudah masa bodoh karena masyarakat beranggapan siapapun yang duduk nanti tidak akan berpengaruh terhadap diri mereka”.

Berdasarkan pernyataan di atas penyebab utama mengapa masyarakat begitu apatis terhadap pemerintah tidak terlepas dari pengalaman di masa lalu, refleksi kinerja pemerintah selama ini, beserta tindak tanduk para pejabat yang dianggap tidak menyentuh di hati rakyat sehingga menjadi pelajaran bagi rakyat untuk pemilihan selanjutnya. Contoh dalam kasus ini dapat dilihat seperti, janji-janji yang tidak ditepati oleh para calon jika mereka sudah menjabat sebagai kepala daerah dan keadaan saling menguntungkan yang terjalin antara rakyat dan pemimpin belum pernah secara nyata ditemui masyarakat, serta informasi yang masyarakat peroleh melalui media massa mengenai kasus-kasus korupsi yang sering melibatkan kepala daerah sehingga masyarakat berfikir dua kali bahkan enggan untuk menggunakan hak suaranya. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan bapak EK salah satu masyarakat desa Sungai Raya

Dalam, saat ditanya mengenai faktor yang mempengaruhi bapak sehingga tidak menggunakan hak pilih pada saat pemilihan Bupati, beliau menjawab: “Saya melihat tidak ada tokoh dari antara para calon yang mampu membuat perubahan yang nyata bagi daerah Kabupaten Kubu Raya ini, paling calon yang duduk nanti hanya mementingkan kepentingan golongannya saja seperti yang sudah-sudah”. Hal serupa juga disampaikan oleh bapak STN ia mengatakan bahwa: “saya tidak memilih saat pilkada tahun lalu soalnya saya tidak percaya kepada para calon yang ada, menurut saya mereka hanya ngomong-ngomong manis pada saat kampanye lihat aja nanti kalau mereka sudah terpilih mana ingat dengan janji-janjinya”.

Berdasarkan pendapat tersebut bisa dilihat bahwa masyarakat meragukan terciptanya perubahan lewat proses pilkada karena suasana yang ditampilkan selalu tidak jauh berbeda dengan masa-masa sebelumnya atau dengan kata lain masyarakat merasa kecewa dengan kepemimpinan dimasa lalu yang berdampak pada ketidakpercayaan masyarakat terhadap para calon pemimpin untuk yang akan datang. Saat-saat sebelum pemilihan menurut para informan semua calon merasa dan mengklaim diri sebagai pihak yang dekat dengan rakyat dan paling tahu masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh rakyat. Namun jika terpilih janji yang terucap seakan-akan tidak pernah keluar dari mulut mereka.

D.3. Faktor Ekonomi Masyarakat

Faktor ekonomi disini sangat erat kaitannya dengan pekerjaan, dimana pemilih lebih mementingkan kebutuhan ekonomi mereka dibandingkan dengan ikut serta berpartisipasi pada setiap kegiatan pemilihan umum khususnya pemilihan kepala daerah. Tuntutan pekerjaan atau ekonomi merupakan tuntutan yang paling mendesak bagi masyarakat yang apabila dihadapkan pada pilihan antara harus bekerja atau membuka usaha yang mereka miliki, dibandingkan dengan datang ke TPS untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum, maka mereka lebih memilih untuk bekerja dan mengejar kebutuhan ekonomi mereka. Mengingat sebagian besar masyarakat yang ada di desa Sungai Raya Dalam menurut data yang diperoleh dari kantor desa Sungai Raya Dalam lebih dari lima puluh persen masyarakat bekerja di bidang informal atau swasta. Tentu ini akan sangat berpengaruh terhadap tingkat partisipasi politik masyarakat pada saat pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2013 yang lalu. karena sektor ini biasanya lebih mementingkan intensitas kerja dan keuntungan atau penghasilannya.

Menurut bapak YLO yang sehari-harinya bekerja disalah satu gudang, saat ditanya mengenai faktor yang mempengaruhi bapak sehingga tidak menggunakan hak pilih pada saat pemilihan Bupati tahun 2013, menurut bapak YLO: Pada saat pemilihan bupati tahun lalu saya tidak memilih karena saya ada pekerjaan, namanya juga pekerjaan kasar kalau tidak bekerja ya tidak dapat uang, makanya saya lebih memilih bekerja dari pada datang ke

TPS, kalau saya datang ke TPS nanti saya terlambat nanti bisa dimarahi”.

Pendapat yang tidak jauh berbeda juga disampaikan oleh ibu STI yang bekerja sebagai karyawan toko, ia mengatakan bahwa: ”saya tidak ada waktu datang ke TPS untuk ikut memilih soalnya saya pagi-pagi sudah harus datang ke toko untuk bekerja”.

Berdasarkan wawancara dengan informan diatas jelas bahwa alasan ekonomi atau pekerjaan menjadi pertimbangan yang sangat sulit untuk ditinggalkan mengingat pekerjaan yang sedang dijalannya menuntut agar mereka tetap hadir meskipun sedang ada pesta demokrasi yang berlangsung, namun itu tidak menjadi penting jika sudah menjangkut dengan urusan kebutuhah hidup sehari-hari. Selain itu faktor ekonomi atau pekerjaan yang menyebabkan masyarakat tidak bisa hadir dalam pemilihan bupati tahun 2013 juga diakibatkan oleh pekerjaan masyarakat yang berada diluar kota yang tidak bisa ditinggalkan bahkan meskipun bisa ditinggalkan namun akan memakan biaya yang cukup besar.

Berdasarkan pernyataan diatas dapat dilihat bahwa pekerjaan merupakan faktor yang sangat mempengaruhi sebagian masyarakat di Desa Sungai Raya Dalam sehingga mereka tidak menggunakan hak politiknya dalam pemilihan bupati, mengingat pekerjaan yang mereka geluti sangat mempengaruhi urusan kehidupan mereka sehari-hari. Namun bagi sebagaian masyarakat di Desa Sungai Raya Dalam yang tingkat perekonominya cukup tinggi faktor pekerjaan bukan lagi faktor yang langsung menyangkut kepada

urusan dapur mereka, namun lebih kepada faktor kerugian yang akan dialami jika mereka ikut serta untuk memilih. Ini terjadi pada masyarakat yang memiliki usaha sendiri, seperti para pedagang.

Hal ini sesuai dengan pendapat salah satu pedagang yaitu ibu YLA saat ditanya mengenai faktor apa yang mempengaruhi ibu sehingga tidak memilih pada pemilihan Bupati tahun 2013 yang lalu, Ibu YLA menjawab: “gimana saya mau ikut milih bang, toko saya saja buka dari pagi sampai sore, ya... dari pada saya datang ke TPS untuk milih lebih baik saya jaga toko”. Jawaban yang tidak jauh berbeda juga di sampaikan oleh bapak HYO yang bekerja sebagai penjual buah, ia mengatakan: “saya tidak bisa memilih pada pemilihan Bupati tahun lalu soalnya rumah saya jauh dari tempat saya berjualan. Setiap pagi saya sudah datang ke toko buah saya, jadi saya tidak sempat datang ke TPS untuk memilih”.

Terjadinya perubahan pemikiran masyarakat yang dulunya tergantung pada pemimpinnya sekarang sudah tidak lagi menempatkan pemimpin sebagai sesuatu yang paling penting, artinya mencari uang adalah sesuatu yang lebih penting, ini menandakan adanya proses pergeseran dari masyarakat tradisional ke masyarakat yang materialistik yang tengah terjadi pada sebagian masyarakat desa Sungai Raya Dalam, terjadinya perubahan ini tidak bisa dielakkan mengingat kondisi desa Sungai Raya Dalam yang merupakan daerah perkotaan, dimana kebutuhan masyarakat perkotaan tidak lagi hanya sekedar kebutuhan primer

namun juga lebih kepada kebutan tersier. Kondisi ini juga diperparah oleh kinerja dari para pemimpin yang tidak bisa dirasakan oleh masyarakat sehingga ikut serta dalam pemilihan adalah kesia-siaan sehingga mereka lebih memilih untuk mencari uang.

D.4. Faktor Sosialisasi

Sosialisasi merupakan sarana bagi masyarakat untuk mengetahui berbagai macam informasi-informasi tentang berbagai hal yang dilaksanakan oleh pihak-pihak terkait dan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan, misalnya sosialisasi mengenai pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan oleh KPUD Kubu Raya maupun oleh partai politik. Pentingnya sosialisasi mengenai pemilihan kepala daerah untuk dilakukan tentu saja dengan harapan dapat meminimalisir tingginya angka masyarakat yang tidak ingin menggunakan hak pilihnya dan sosialisasi yang mendalam terhadap masyarakat merupakan suatu cara yang tepat untuk meningkatkan partisipasi politik pada saat pemilihan kepala daerah. Sosialisasi yang mendalam ini dapat dilakukan dengan cara melakukan pertemuan secara langsung terhadap masyarakat baik itu melalui suatu forum diskusi maupun dengan mendatangi masyarakat secara langsung.

Sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kubu Raya lebih diberikan kepada tugas dan wewenang kepada PPK dan PPS yang juga sebagai jajarannya untuk melaksanakan sosialisai kepada masyarakat. Ini sesuai dengan pendapat yang disampaikan oleh ketua KPU Kabupaten Kubu Raya IM, yang saat ditanya apakah

sebelum pelaksanaan pemilihan bupati ada sosialisasi yang dilakukan oleh KPU kabupaten. Menurut beliau:

Kalau sosialisasi tentu saja ada, namun karena KPU itu kelembagaan jadi dia bersifat hierarki dimana ada KPU kabupaten kemudian ada PPK kemudian ada PPS dan ada KPPS, nah karena itu cenderung yang kita utamakan itu sosialisasinya bersifat hierarki atau terstruktur, KPU ditingkat kabupaten, ditingkat kecamatan dilaksanakan oleh PPK, kemudian ditingkat desa dilaksanakan oleh PPS dengan mengundang kelompok-kelompok yang berkepentingan misalnya tokoh-tokoh masyarakat dan partai politik. Nah diluar itu ada juga bentuk-bentuk sosialisasi yang kami lakukan melalui media seperti melakukan talkshow di televisi-televisi lokal,, kemudian pemberitaan di koran-koran dan ada juga dalam bentuk spanduk atau baliho yang pada umumnya bersifat ajakan-ajakan terhadap masyarakat agar pada hari pemungutan suara mereka mau datang ke TPS untuk menggunakan hak pilih yang mereka miliki.

Pendapat ketua KPU kabupaten ini sesuai dengan pendapat salah satu ketua PPS di desa sungai raya dalam yaitu bapak SH, yang mengatakan bahwa: “Kalau dari kami sosialisasinya memang ada namun sosialisasinya hanya bersifat

pengetahuan terhadap ketua RT yang juga sekaligus sebagai ketua KPPS supaya menghibau kepada warganya agar datang ke TPS-TPS untuk menggunakan hak pilihnya”.

Berdasarkan pendapat yang diutarakan oleh ketua KPU Kabupaten Kubu Raya dan ketua PPS jelas bahwa mereka telah melaksanakan tanggung jawabnya sebagai penyelenggara pemilu dengan baik. Sosialisasi yang mereka lakukan lebih kepada penghimbau kepada masyarakat agar mau menggunakan hak suara yang dimiliki, selain itu sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten juga berbentuk pemberitahuan mengenai tanggal pemungutan suara dilaksanakan. Dalam hal sosialisasi yang memiliki peran penting sebenarnya bukan KPU melainkan para calon dan partai politik karena para calon yang secara langsung mempunyai kepentingan agar masyarakat datang ke TPS untuk memilih mereka, selain itu partai politik juga mempunyai peran penting dalam hal ini karena partai politik merupakan kendaraan para calon yang non independen tersebut. Ini sesuai dengan pendapat ketua KPU Kubu Raya IM yang mengatakan:

Sebenarnya dalam Pilkada yang menentukan tinggi-rendahnya partisipasi tidak terletak disosialisasi KPU tapi terletak pada peserta Pilkadanya dan partai politik pengusung para calon karena yang berkepentingan orang hadir ke TPS itu bukan KPU tapi calon yang bersangkutan dan partai pengusung, dimana calon yang bersangkutan

mengajak pemilih untuk hadir ke TPS pada saat kampanye semakin tinggi partisipasi pemilih hadir ke TPS semakin efektif kampanye yang dilaksanakan oleh para calon maupun partai pengusung.

Berdasarkan pendapat yang diutarakan oleh ketua KPU Kubu Raya jelas bahwa para calon peserta pemilu dan partai politik pengusung mempunyai kepentingan yang sangat tinggi terhadap kehadiran masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya pada Pilkada. Sehingga sosialisasi yang efektif dari partai politik maupun calon akan menimbulkan rasa ketertarikan tersendiri yang dirasakan oleh masyarakat untuk memilih. Menurut Ketua PAC PDIP sungai raya yaitu BM saat ditanya apakah ada sosialisasi yang dilakukan oleh partai politik pada saat Pilkada tahun lalu. Menurutnya: “kalau sosialisasi tentu saja ada, tapi tidak disemua tempat kita adakan sosialisasi mengingat biaya yang dikeluarkan untuk sosialisasi juga sangat besar”.

Berdasarkan pendapat yang diutarakan oleh ketua PAC jelas bahwa dalam sosialisasi atau kampanye terhadap masyarakat memang kurang efektif mengingat biaya yang dikeluarkan sangat tinggi, sehingga cenderung masyarakat kurang mengenal para calon peserta pemilu dan visi misi yang ingin disampaikan. Sehingga pada akhirnya menyebabkan banyaknya masyarakat yang tidak menggunakan hak pilih mereka. Seperti ibu ER yang saat ditanya alasannya sehingga tidak menggunakan hak pilihnya beliau mengatakan “soalnya

binggung siapa yang mau dipilih”. Hal yang tidak jauh berbeda juga dikatakan oleh bapak IKD yang mengatakan: “saya tidak ikut pemilihan Bupati pada waktu itu soalnya saya tidak tahu apa program-program yang ingin dilaksanakan oleh para calon, paling yang saya tahu cuma lihat spanduk-spanduk gambar calon”.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa masyarakat diatas jelas bahwa mereka kurang mendapatkan sosialisasi mengenai program-program atau visi misi yang ingin disampaikan oleh para calon kandidat sehingga mereka tidak menggunakan hak pilih yang mereka miliki. Dan jika adanya sosialisasi yang mendalam dari para kandidat atau tim sukses kandidat terhadap masyarakat kemungkinan besar masyarakat yang tidak memilih karena faktor ini bisa berupa pikiran dan mau menggunakan hak pilih yang mereka miliki.

D.5. Faktor Administrasi

Faktor administrasi disini adalah faktor yang berkaitan dengan aspek administrasi yang mengakibatkan masyarakat tidak menggunakan hak pilihnya. Seperti tidak mendapatkan kartu undangan dari pihak terkait (KPU). Selain tidak mendapatkan undangan faktor administrasi dalam pembahasan ini juga terkait masalah kependudukan, dimana ada masyarakat yang terdaftar dalam DPT namun pindah tempat tinggal dan masyarakat yang terdaftar dalam DPT namun sudah meninggal.

Menurut Ketua KPU Kabupaten Kubu Raya IM saat ditanya mengenai bagaimana

pengaruh administrasi terhadap rendahnya tingkat partisipasi masyarakat pada pilkada Kubu Raya tahun 2013 yang lalu, menurutnya:

Kalau faktor administrasi memang ada pengaruhnya ini diakibatkan oleh adanya pemilih ganda, pemilih yang sudah pindah tempat tinggal kemudian ada pula pemilih yang sudah meninggal namun masih terdaftar dalam DPT. Mengapa itu terjadi misalnya sudah meninggal tapi masih terdaftar dalam DPT ini dikarenakan keluarga yang bersangkutan itu tidak mengurus yang namanya akte meninggal, sehingga kita dalam keadaan ragu-ragu tidak berani mencoret, karena kalau ternyata orang yang bersangkutan ternyata masih hidup kemudian kita coret itu bisa kena pidana.

Berdasarkan hasil wawancara diatas ketua KPU memang mengaku adanya kesalahan dari KPU sebagai penyelenggara pemilu dalam hal pemutakhiran data sehingga masih terdapat pemilih yang memiliki daftar pemilih ganda, masyarakat yang pindah tempat tinggal dan masyarakat yang meninggal namun masih terdaftar dalam DPT. Selain faktor yang disampaikan oleh ketua KPUD mengenai pemilih ganda, pemilih yang berpindah tempat tinggal dan pemilih yang meninggal. Faktor administrasi ini juga menyangkut terhadap pemilih yang tidak mendapatkan undangan sehingga tidak menggunakan hak suara yang dimiliki.

Seperti yang disampaikan oleh BM salah satu tokoh politik dari

PDIP, saat ditanya faktor apa yang menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat pada pemilihan Bupati tahun 2013 yang lalu, “kalau saya lihat ada dua faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat, pertama kalau saya lihat banyak masyarakat yang tidak mendapatkan kartu undangan, jadi mau tidak mau mereka ini golput karena masyarakat malas untuk mengurus-ngurus kartu undangan tersebut”.

Pernyataan yang tidak jauh berbeda juga disampaikan oleh Kepala Desa yaitu bapak CA saat ditanya mengenai faktor apa yang menyebabkan banyaknya masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya pada pemilihan Bupati di Desa Sungai Raya Dalam pada tahun 2013 yang lalu, menurut beliau:

Saya akui memang partisipasi politik masyarakat di desa Sungai Raya Dalam memang rendah ada faktor-faktor yang membuat kerendahan tersebut, terutama masalah pendataan, pendataan itu kalau saya lihat banyak yang tidak sinkron, misalnya saja ada warga yang sudah meninggal namun dapat kartu undangan begitu juga sebaliknya ada masyarakat yang terdaftar dalam DPT namun tidak diberi kartu undangan. Memang masyarakat disini kalau saya lihat jika mereka betul-betul tidak diberi kartu undangan mereka tidak mau hadir ke TPS.

Berdasarkan pendapat Kepala Desa Sungai Raya Dalam dimana menurutnya jika masyarakat

benar-benar tidak mendapat undangan mereka tidak mau hadir ke TPS. Ini sesuai dengan pendapat informan seperti ibu SS saat ditanya mengenai faktor apa yang mempengaruhi ibu sehingga tidak menggunakan hak suara yang dimiliki pada Pilkada tahun 2013 yang lalu menurutnya “bagaimana saya mau milih barang tidak dapat kartu undangan”. Hal serupa juga disampaikan oleh bapak WLM dan bapak YD yang pada intinya mengatakan bahwa mereka tidak mendapatkan kartu undangan sehingga tidak datang ke TPS untuk memilih.

D.6. Faktor Dominan yang Mempengaruhi Rendahnya Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat.

Berdasarkan pada pembahasan-pembahasan yang telah diuraikan diatas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat di desa Sungai Raya Dalam pada pemilihan Bupati Kabupaten Kubu Raya, maka yang menjadi faktor dominan adalah sikap apatis, sikap apatis ini didasari oleh faktor kesadaran politik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dimana masyarakat tidak tertarik terhadap pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang hanya sebagai rutinitas lima tahun sekali dan setelah pemilihan selesai tidak ada perubahan yang masyarakat rasakan sehingga masyarakat masa bodoh terhadap hak suara yang dimiliki dan menganggap ikut dalam pemilihan merupakan suatu kesia-siaan.

Sikap apatis sangat dominan menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat desa Sungai Raya. Dalam juga ada kaitannya dengan faktor administrasi, dimana sebenarnya masyarakat masih bisa menggunakan hak suara yang dimiliki meskipun tidak mendapatkan surat undangan yaitu dengan menggunakan KTP, namun karena sikap apatis, masyarakat enggan untuk datang ketempat pemungutan suara.

E. PENUTUP

E.1. Kesimpulan

1. Kurangnya kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia yang dialami oleh masyarakat sehingga menimbulkan sikap apatis, dimana masyarakat tidak peduli atau masa bodoh dengan kegiatan penyelenggaraan pilkada di daerahnya, sikap ini timbul karena ikut maupun tidak dalam pilkada menurut masyarakat tidak akan berpengaruh terhadap kehidupan mereka sehari-hari. Kesadaran politik masyarakat dapat ditingkatkan dengan melakukan pendidikan politik karena dengan melakukan pendidikan politik terhadap masyarakat dapat meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia dalam bentuk ikut serta dalam melaksanakan hak politik pada pilkada.
2. Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah juga merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan rendahnya partisipasi masyarakat terhadap pemilihan bupati, dimana

masyarakat sebenarnya ingin menggunakan hak politik yang mereka miliki namun karena melihat kinerja pemerintah sebelumnya yang tidak memberikan perubahan yang nyata sehingga masyarakat meragukan figur-figur yang tampil dalam pemilihan Bupati tahun 2013 yang lalu. Sehingga timbul juga sikap apatis didalam diri masyarakat dimana mereka tidak peduli dengan hak suara yang mereka miliki.

3. Faktor ekonomi yang mengakibatkan masyarakat tidak menggunakan hak politik yang dimiliki, sangat erat kaitannya dengan pekerjaan di sektor informal/swasta, dimana sektor ini sangat mengutamakan intensitas pekerjaan, dimana menurut masyarakat pekerjaan yang mereka geluti sangat berpengaruh terhadap kebutuhan mereka sehari-hari, sedangkan pelaksanaan pilkada tidak akan berpengaruh apa-apa terhadap kehidupan mereka sehari-hari, sehingga masyarakat lebih mengutamakan pekerjaan yang mereka geluti dari pada datang ke TPS untuk berpartisipasi menggunakan hak suara yang mereka miliki. Namun bagi sebagian masyarakat yang membuka usaha atau pekerjaan wiraswasta dimana faktor kerugian yang dirasakan jika mereka ikut serta dalam pemilihan bupati menjadi pertimbangan mereka sehingga tidak ikut serta berpartisipasi dalam pilkada.
4. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh para calon

maupun partai politik pengusung mengakibatkan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang siapa dan apa visi-misi yang ingin dilaksanakan jika para calon berhasil memenangkan pilkada, sehingga masyarakat enggan untuk menggunakan hak politik yang mereka miliki atau bisa dikatakan mereka tidak mau membeli kucing dalam karung.

5. Faktor administrasi mempengaruhi rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat di Desa Sungai Raya dalam diakibatkan oleh beberapa alasan seperti: banyaknya masyarakat yang tidak mendapatkan kartu undangan, masyarakat yang pindah tempat tinggal namun masih terdaftar dalam DPT dan ada masyarakat yang sudah meninggal namun masih terdaftar dalam DPT. Ini sebenarnya adalah tugas dan tanggung jawab semua pihak baik itu penyelenggara pilkada maupun masyarakat itu sendiri. Namun tugas ini lebih ditanggungkan kepada penyelenggara pemilu terutama ketua RT dimana ia sebagai ujung tombak dalam penyelenggaraan pilkada di daerahnya.
6. Faktor dominan yang mempengaruhi rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat di Desa Sungai Raya Dalam adalah sikap apatis, dimana sikap apatis dipengaruhi oleh faktor kesadaran politik dan kepercayaan masyarakat pada pemerintah. Sikap apatis juga terkait dengan faktor administrasi dimana seharusnya masyarakat dapat menggunakan hak suara

yang mereka miliki dengan menggunakan KTP.

E.2. Saran

1. Penyelenggara pemilu.
Sebaiknya KPU dalam penyelenggaraan pemilu seharusnya menghimbau kepada jajarannya agar melakukan pendataan secara akurat dan menghimbau kepada para ketua RT agar memberikan surat undangan kepada masyarakat yang memiliki hak untuk ikut serta dalam pemilihan bupati.
2. Partai politik
Partai politik dalam mengusung calon seharusnya mengusung calon yang benar-benar mempunyai kredibilitas atau calon yang benar-benar mempunyai sepak terjang yang baik dimata masyarakat, sehingga ekspektasi masyarakat terhadap pemilihan bupati akan tinggi dan ini tentu saja akan berpengaruh langsung terhadap tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pilkada.
3. Calon Bupati
Siapun yang duduk sebagai bupati sebaiknya mereka segera menepati janji-janji mereka saat sosialisasi/kampanye agar tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin/pemerintah semakin tinggi dan juga diharapkan bupati terpilih mau turun langsung ke masyarakat dan melihat sebenarnya apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga masyarakat bisa merasakan bahwa pemimpin yang mereka pilih memang benar-benar ada di tengah-tengah mereka. Sehingga untuk pemilihan kepala daerah

berikutnya tingkat partisipasi masyarakat akan meningkat.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Novel. 1999. **Peradaban Komunikasi Politik**. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Budiarjo, Miriam. 2008. **Dasar-Dasar Ilmu Politik**. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Hendardi. 2007. **Hukum dan Kesadaran Politik Rakyat**. Jakarta: CIDES.
- Huntington, Samuel P. Dan Joan Nelson. 1994. **Partisipasi Politik di Negara Berkembang**. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Maran, Rafael Raga. 2007. **Pengantar Sosiologi Politik**. Jakarta: PT Rineke Cipta.
- Miles, Matthew B dan Humbermen, Michael. 1992. **Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode Baru**. Terjemahan Tjetjep Rohendy. Jakarta: UI Press.
- Moleong, lexy.j. 2006. **Metode Penelitian Kualitatif**. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, Farouk. 2003. **Metodologi Penelitian Sosial**. Jakarta: PAU Ilmu Sosial UI.
- Nazir, Mohammad. 1999. **Metode Penelitian**. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rahman, A. 2007. **Sistem Politik Indonesia**. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ruslan, Ustman Abdul Muiz. 2000. **Pendidikan Politik Ikhwanul Muslimin**. Solo: Era Intermedia.
- Soehartono, Irwan. 2002. **Metode Penelitian Sosial**. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. 2007. **Memahami Penelitian Kualitatif**. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2011. **Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D**. Bandung: Alfabeta.
- Surbakti, Ramlan. 1992. **Memahami Ilmu Politik**. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- ### Rujukan Internet
- Eep Saefulloh Fatah. **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Golput**, Diambil pada Tanggal 15 Januari 2015 dari <https://lampungpolitika.wordpress.com/2008/08/04/golput-dan-krisis-kepercayaan/>.
- ### Dokumen - Dokumen.
- KPUD Kab. Kubu Raya. 2013: Rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2013.
- Profil Desa Sungai Raya Dalam Tahun 2013.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA

Jalan A.Yani Pontianak, Kotak Pos 78124

Homepage: <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>

Email: jurnalmhs@fisip.untan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Martinus Manalu
NIM / Periode lulus : E02109036 / 2014
Fakultas/Jurusan : ISIP / Ilmu Politik
E-mail address/HP : Martinus_manalu@yahoo.com / 085386112897

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Politik *) pada Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **):

Partisipasi Politik Masyarakat Desa Sungai Raya
dalam Pada Pemilihan Bupati Kubu Raya Tahun
2013

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- ☒ secara fulltext
- ☒ content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/disetujui
Pengelola Jurnal Aspiran: IRL
Dr. Fahrurrozy, S.IP, M.S.
NIP. 196911222002121002

Dibuat di : Pontianak
Pada tanggal: 20-02-2015

Martinus Manalu
(Martinus Manalu)
nama terang dan tanda tangan mhs

catatan:

*tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing

setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author).